

Berlin, 26 November 2012

Nomor : 058/II-F-1/PR-PPIJ-201012/26112012

Perihal : **Penegasan Kembali Sikap PPI di Jerman Terhadap Kunjungan Anggota DPR**

**SIKAP PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA DI JERMAN
TERHADAP KUNJUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA**

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman merupakan elemen masyarakat netral yang dilindungi hak dan kewajibannya oleh undang-undang untuk memperoleh informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk konsistensi kami, dan dukungan terhadap sikap penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di Indonesia dan di seluruh dunia yang melihat banyaknya kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sampai saat ini masih dipertanyakan transparansi, urgensi dan manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia, dengan ini kami, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman kembali menegaskan apa yang menjadi sikap dan tuntutan kami kepada Anggota DPR yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, yaitu:

1. Menuntut anggota DPR untuk mempublikasikan secara resmi dan terperinci agenda kunjungan kerja paling lambat satu bulan sebelum keberangkatan. Rincian tersebut meliputi: latar belakang kunjungan kerja, target-target yang ingin dicapai, pihak yang akan dikunjungi atau partner kerja di negara tujuan, materi-materi yang akan dibicarakan dengan partner kerja, nama-nama anggota dewan yang dilibatkan dan detail biaya yang akan dikeluarkan (tiket pesawat, penginapan, uang saku, dll).
2. Mempublikasikan paling lambat satu bulan setelah kembali ke tanah air secara resmi dan terperinci mengenai hasil kunjungan kerja yang meliputi: target-target yang telah tercapai dan belum tercapai, kendala dalam mencapai target yang telah ditentukan, dan rencana tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja tersebut.

Perlu dipahami bahwa kami tidak anti terhadap kunjungan kerja, selama manfaatnya jelas, urgensinya tepat, transparan, efektif dan juga efisien sebagai tanggung jawab anggota dewan terhadap rakyat, mengingat banyaknya uang rakyat yang telah dihaburkan tanpa manfaat yang jelas untuk rakyat banyak itu sendiri.

Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan menggalang gerakan yang lebih besar untuk mengawasi kunjungan anggota DPR ke luar negeri. Di samping itu, kami juga mempertimbangkan untuk mengidentifikasi anggota dewan yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab.

Melalui surat terbuka ini kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia di seluruh dunia untuk bersama-sama mengadakan gerakan pengawasan bagi anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja di mana pun, agar harapan kita atas terwujudnya Dewan Perwakilan Rakyat yang profesional dan berpihak pada rakyat dapat segera tercapai.